

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
TINDAKAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

Bening Laila Shaqila

NIM. 165020307111019

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi***



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2021

**THE INFLUENCE OF COORPORATE GOVERNANCE ON ACCOUNTING
FRAUD IN PUBLIC COMPANIES IN INDONESIA**

By :

Bening Laila Shaqila
NIM. 165020307111019

SKRIPSI

*Submitted in Partial Fulfilment of The Requirements for
The Award of Economic Bachelor*



ACCOUNTING MAJOR
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

BRAWIJAYA UNIVERSITY
MALANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Yang disusun oleh:

Nama: Bening Laila Shaqila

NIM: 165020307111019

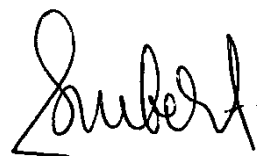
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Jurusan: S-1 Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 08 Desember 2020

Dosen Pembimbing,



Drs. Imam Subekti, Ak., M.Si., Ph.D.

NIP. 196511021992031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Yang disusun oleh:

Nama: Bening Laila Shaqila

NIM: 165020307111019

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Jurusan: Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 29 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Drs. Imam Subekti, Ak., M.Si., Ph.D.

NIP. 19651102 199203 1 002

(Dosen Pembimbing)

2. Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.

NIP. 196407091991032007

(Dosen Penguji I)

3. Nurlita Novianti, SE., MSA., Ak.

NIP. 198711132019032009

(Dosen Penguji II)

Malang, 09 Januari 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 19651102 199203 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Bening Laila Shaqila**

Tempat, tanggal lahir : **Jakarta, 13 Maret 1998**

NIM : **165020307111019**

Jurusan : **Akuntansi**

Alamat : **Jl. Duku 6 Blok H2/10, Pamulang Estate, Tangerang Selatan**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB 2: TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS.....	12
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.2 <i>Corporate Governance</i>	15
2.2.1 Kepemilikan Manajerial.....	18
2.2.2 Kepemilikan Institusional.....	19
2.2.3 Dewan Komisaris.....	19
2.2.4 Rekomendasi Dewan komisaris.....	21
2.2.5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	22
2.3 Kecurangan Laporan Keuangan.....	23
2.4 Kerangka Teoritis.....	26

4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda	50
4.5 Analisis Hasil Penelitian.....	56
4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	56
4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	57
4.5.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	58
4.5.4 Pengaruh Rekomendasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Kecurangan Laporan Keuangan	59
4.5.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	60
BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN...	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Keterbatasan	63
5.3 Saran Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Teknik Pengambilan Sampel	47
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	48
Tabel 4.3 <i>One Sample T Test</i>	49
Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda Kecurangan Laporan Keuangan	50



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	26
Gambar 4.1 Grafik Normal P. P Plot Regresi Kecurangan Laporan Keuangan	53
Gambar 4.2 Grafik Histogram Regresi Kecurangan Laporan Keuangan....	53
Gambar 4.3 Grafik Normal P. P Plot Data 100 Sampel	54
Gambar 4.4 Grafik Histogram Data 100 Sampel.....	55
Gambar 4.5 Scatterplot Kecurangan Laporan Keuangan	55

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Perusahaan Manufaktur yang diajdikan sampel.....	70
Lampiran 2. Tabulasi Data Sampel Penelitian.....	72
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	76
Lampiran 4. Hasil Uji <i>One Sample T Test</i>	77
Lampiran 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	78
Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	79



ABSTRAK**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN
KECURANGAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI
INDONESIA****Bening Laila Shaqila****NIM. 165020307111019****Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia****e-mail: beningshaqila@student.ub.ac.id/ telp: +628 817 012 1303****Dosen Pembimbing: Drs. Imam Subekti, Ak., M.Si., Ph.D.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, rekomendasi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 120 observasi pada 40 perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode dokumentasi pada laporan keuangan yang dapat diakses di situs resmi BEI www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris dan rekomendasi dewan komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan kepemilikan manajerial dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata kunci: tata kelola perusahaan, kecurangan dalam laporan keuangan.

ABSTRACT

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON ACCOUNTING FRAUD IN PUBLIC COMPANIES IN INDONESIA

Bening Laila Shaqila

NIM. 165020307111019

**Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Malang,
Indonesia**

e-mail: beningshaqila@student.ub.ac.id/ telp: +628 817 012 1303

Advisor: Drs. Imam Subekti, Ak., M.Si., Ph.D.

The objective of this research is to examine the effect of corporate governance measured by the managerial ownership, institutional ownership, board of commissioners, recommendation of board of commissioners, and number of commissioner meetings on fraudulent financial reporting. This research employs quantitative approach and the populations are public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), where, through purposive sampling, 120 observable data from 40 companies within three years are collected from the documentation of financial report accessed from the official IDX webpage: www.idx.co.id. The results of the study indicate that institutional ownership, the board of commissioners and the recommendations of the board of commissioners have an effect on fraudulent financial statements, while managerial ownership and the number of board meetings have no effect on fraudulent financial statements.

Keywords: corporate governance, fraudulent financial reporting.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan (Kasmir, 2013:7). Menurut PSAK No. 1 (2015:1), Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pelaporan keuangan ini bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Pengguna laporan keuangan terdiri dari dua golongan, yaitu pemakai internal dan eksternal. Pemakai internal adalah pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, terutama manajer. FASB berpendapat bahwa pemegang saham, investor lain, kreditor adalah pemakai utama laporan keuangan (Hendriksen, 2002). Pemakai eksternal adalah investor atau calon investor yang meliputi pembeli atau calon pembeli saham atau obligasi, kreditor atau peminjam dana bank, supplier dan pemakai-pemakai lain seperti karyawan, analis keuangan, pialang saham, pemerintah (berkaitan dengan pajak), Baepem (berkaitan dengan perusahaan *go public*).

Laporan keuangan digunakan oleh investor sebagai acuan untuk mengetahui dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang dapat diharapkan dari kinerja bisnis perusahaan tersebut. Atas dasar informasi tersebut investor akan memepertimbangkan serta memutuskan untuk berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut. Bagi kreditor laporan keuangan digunakan untuk memastikan dan mengetahui apakah perusahaan yang akan mereka pinjamkan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bagi karyawan laporan keuangan digunakan untuk melihat prospek apakah perusahaan tempatnya bekerja memiliki keuangan dan keamanan yang bagus. Bagi pemerintah laporan keuangan digunakan untuk penentuan besaran pajak yang sesuai untuk perusahaan tersebut dan kelayakan perusahaan untuk *go public*.

Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya dapat dipahami, relevan, reliability, dapat dibandingkan dan konsisten (Kieso, Warfield, 2011:44). Pentingnya informasi pada laporan keuangan yang disajikan harusnya dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama pada era globalisasi saat ini yang mana perkembangan bisnis itu sendiri sangat pesat dan kompetitif. Namun, pada kenyataannya laporan keuangan dapat menjadi celah bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi atau kecurangan.

Menurut Rezaee (2002) bahwa sudah dua dekade terakhir *fraudulent financial statement* telah meningkat secara subtansial. Kecurangan laporan keuangan atau *fraudulent financial statement* adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai

laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan telah dijelaskan dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) no.70 yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dalam efek yang timbul adalah ketidaksesuaian laporan keuangan, dalam semua hal yang material dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*overstates*) terhadap asset atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya (*understates*) terhadap kewajiban dan beban. Kecurangan laporan keuangan dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Keuntungan akan didapat oleh pelaku bisnis yang dapat melebihi hasil usahanya sehingga akan mendapat citra baik dimata publik, sedangkan disisi lain dapat merugikan pihak pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Menurut the *Association Certified Fraud Examinees* (ACFE) kecurangan merupakan segala sesuatu hal yang dilakukan secara lhai untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelecikan atau mengelabui dan cara tidak jujur dan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh *Association Certified Fraud Examinees* (ACFE) menunjukan bahwa 83% kasus kecurangan dilakukan oleh pemilik perusahaan atau manajer (Brenan dan McGrath, 2007). Selain itu, ACFE menggolongkan kecurangan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misapporation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent financial statement*), korupsi

(*corruption*). Dalam penelitian ini, ACFE melaporkan bahwa *fraudulent financial statement* memiliki tingkat presentase serta tipe *fraud* yang frekuensi kejadiannya paling rendah. Namun, tipe *fraud* ini memiliki dampak kerugian yang paling besar.

Hal tersebut akan mengakibatkan informasi yang disajikan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan, yang mana informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pihak eksternal dan internal perusahaan serta dapat menimbulkan pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak relevan.

Terdapat beberapa hal lain yang mendasari terjadinya tindak kecurangan, yaitu: (1) tekanan untuk melakukan kecurangan; (2) adanya peluang untuk melakukan kecurangan; (3) rasionalisasi atau sikap untuk melakukan tindak kecurangan. Menurut Priantara (2013) Tekanan akan timbul akibat adanya masalah keuangan pribadi, sehingga seseorang dapat melakukan tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan norma atau adanya tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Peluang akan timbul dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal dan tata kelola dalam organisasi tersebut. Sedangkan rasionalisasi terjadi karena seseorang meyakini bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan suatu kecurangan.

Skandal akuntansi sudah menyebar luas, banyak perusahaan di dalam maupun luar negeri yang terlibat dengan skandal kecurangan laporan keuangan.

Salah satu skandal yang terkenal di dunia adalah skandal perusahaan Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen pada tahun 2002. Pada tahun tersebut perusahaan ini meningkatkan labanya pada saat perusahaan tersebut rugi. Skandal akuntansi lainnya adalah kasus WorldCom, Toshiba, PT. Kimia Farma, PT. Perusahaan Listrik Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan lain-lain (Rismawati, 2019).

Di Indonesia salah satu sektor yang memungkinkan melakukan tindak kecurangan yaitu sektor *real estate*. Namun, pada kenyataannya kasus kecurangan tidak hanya terjadi pada perusahaan manufaktur saja. Banyak sektor keuangan dan perbankan yang juga melakukan praktik kecurangan. Seperti halnya skandal akuntansi yang baru-baru ini dialami oleh salah satu perusahaan dan bank ternama dalam memodifikasi atau memanipulasi laporan keuangan yaitu PT. Hanson International dan Bank Bukopin.

OJK menjatuhkan denda kepada Direktur Utama Hanson International, sebesar Rp. 5 miliar. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana menjelaskan perseroan terbukti melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estate (PSAK 44). Hal itu terutama dalam penjualan Kavling Siap Bangun (Kasiba) senilai Rp732 miliar. Perseroan tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) terkait penjualan Kasiba pada laporan keuangan 2016. Dalam hal ini perseroan juga tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan Hanson International dan OJK. Akibatnya pendapatan pada laporan keuangan Hanson International per 31 Desember 2016 menjadi *overstated* dengan nilai material sejumlah Rp613 miliar. Serta menyebabkan OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan PT Hanson International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan per 31 Desember 2016 (Idris, 2019).

Modifikasi laporan keuangan merupakan hal yang sering terjadi dalam industri perbankan. Kasus terbaru muncul di PT. Bank Bukopin Tbk. Modifikasi yang dilakukan pada data kartu kredit yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Kejadian ini lolos dari berbagai layer pengawasan dan audit. Mulai dari audit internal Bukopin, Kantor Aukuntan Publik (KAP), Bank Indonesia dan OJK. Dari berbagai layer pengawasan, kasus ini ditemukan oleh internal Bukopin pada tahun lalu. Dengan adanya kasus ini, manajemen Bukopin harus merevisi laporan keuangan dari tahun 2015, 2016, dan 2017 (Donald, 2018).

Melihat banyaknya peristiwa yang telah terjadi, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan.

Pada era globalisasi ini, negara-negara di dunia ini seharusnya sudah memiliki sistem tata kelola yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan. Sistem itu sering disebut dengan *Good Corporate Governance*, dengan adanya tata kelola yang baik maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor. Oleh karena itu, dengan adanya sistem tata kelola ini perusahaan diharapkan dapat mengatasi krisis keuangan maupun non keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Priswa (2019) yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar

di BEI dalam rentang waktu 2015-2017 dengan menggunakan perhitungan *Beneish M-score*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap tindak kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prisiwita (2019) yang menghubungkan variabel-variabel proksi tata kelola dengan tindakan kecurangan. Namun, dari hasil penelitian Prisiwita (2019) *corporate governance* dalam penelitiannya hanya diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional yang mana belum cukup mencerminkan *corporate governance* perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan perhitungan *Beneish M-score*. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan perhitungan *F-score*.

Pada penelitian ini juga mengganti variabel komite audit dengan dua variabel baru yaitu variabel rekomendasi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris, dengan alasan bahwa pada penelitian sebelumnya komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, maka dari itu peneliti mengganti variabel komite audit dengan dua variabel baru yaitu rekomendasi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum, kecurangan akan selalu terjadi apabila tidak adanya pencegahan dan pendeteksian sebelumnya. Melihat skandal akuntansi yang mulai banyak menjamur di Indonesia, terutama pada kecurangan laporan keuangan yang memiliki informasi penting dalam pengambilan keputusan pihak internal dan

eksternal perusahaan. Maka perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Kedua hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer untuk melakukan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem tata kelola ini perlu ditingkatkan kualitasnya agar para manajer tidak melakukan penyimpangan dari pemangku kepentingan

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan kecurangan akuntansi. Penelitian ini menguji pengaruh *good governance* terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, rekomendasi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
4. Apakah rekomendasi dewan komisaris berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?
5. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh rekomendasi dewan komisaris terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata kelola terhadap tindakan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Dapat memberi bukti empiris untuk menguji teori dari tata kelola perusahaan terhadap tindakan kecurangan akuntansi pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- d. Menjadi sumber informasi dan refresnsi bagi penelitian sejenis pada peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplemantasikan pengetahuan yang telah peneliti pelajari selama di bangku perkuliahan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai tata kelola bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dengan topik yang sama.
- c. Bagi perusahaan
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen agar menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar

sehingga dapat memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan tersebut.

1.5 Sistematika Penelitian

Kerangka sistematika ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama: pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua: telaah literature dan hipotesis. Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, rekomendasi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Sedangkan variabel dependennya adalah kecurangan terhadap laporan keuangan. Kerangka berfikir dan hipotesis.

Bab ketiga: metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat: analisis dan pembahasan. Bab ini berisi tentang penjelasan hasil dari penelitian dan dilakukannya pembahasan berdasarkan hasil dari analisis penelitian. Serta pembaharuan hasil penelitian untuk menjelaskan hipotesis yang dikembangkan.

Bab kelima: penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis penelitian berdasarkan tujuan yang ada, keterbatasan penelitian, dan implikasi untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi atau keagenan merupakan basis teori yang mendasari pemikiran dalam memahami konsep *corporate governance*. Teori agensi menjelaskan pentingnya pemilik perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada tenaga profesional atau yang biasa kita sebut dengan agen.

Menurut Jensen (1976), teori agensi merupakan sebuah kontrak antara *agent* (manajer) dengan *principal* (investor). Teori ini berasumsi bahwa adanya sifat individu yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu. Dari asumsi ini adanya sifat dasar manusia tersebut, dapat menyebabkan konflik antara manajer dan pemegang saham.

Terdapat dua masalah agensi, pertama adalah konflik keagenan antara *principal* dan *agent*. Masalah ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kesenjangan informasi. Kedua adalah konflik keagenan yang muncul dari konflik kepentingan antara *principal* dan *principal* (Villalonga *et al.*, 2006).

Perkembangan teori agensi ini telah menggeser fokus peneliti dari konflik kepentingan tradisional antara agen dan prinsipal – masalah agensi tipe I Jensen (1976) terhadap kepentingan lainnya yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sebagai masalah agensi tipe II (Villalonga *et al.*, 2006).

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen ini dapat

diatasi dengan kepemilikan terkonsentrasi karena dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen. Namun, disisi lain hal ini justru akan menimbulkan masalah lain yaitu konflik antar pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ketika pemilik meningkatkan kepemilikan mereka dengan menambah penyertaan modalnya hingga batas dimana mereka dapat memperoleh hak kontrol perusahaan maka terjadi perubahan konflik dari prinsipal dengan manajemen menjadi pemegang saham minoritas dan mayoritas (Bhasin, 2010).

Menurut Cahyani (2014) masalah agensi tipe II ini sangat relevan untuk penelitian khususnya di Negara Asia termasuk di Indonesia, yang mana struktur kepemilikan perusahaannya adalah struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Agensi tipe II ini mendeskripsikan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki hak untuk mempengaruhi manajemen dalam menentukan arah keputusan perusahaan. Hak tersebut digunakan pemegang saham mayoritas untuk menguasai kebijakan perusahaan agar dapat mengeksploitasi hubungan bisnis perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Kondisi tersebut membuat pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang sulit untuk memaksimalkan kepentingan mereka sepanjang memiliki tujuan yang bertentangan dengan pemegang saham mayoritas (Larasdiputra *et al.*, 2019). Selain masalah keagenan tipe I dan II terdapat permasalahan keagenan tipe III pada permasalahan keagenan antara pemilik dana (kreditur) dan pengelola dana (debitur) (Villalonga *et al.*, 2006).

saham dan manajemen ini dapat diatasi dengan kepemilikan terkonsentrasi karena dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen. Namun disisi lain hal ini justru akan menimbulkan masalah lain yaitu konflik antar

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ketika pemilik meningkatkan kepemilikan mereka dengan menambah penyertaan modalnya hingga batas dimana mereka dapat memperoleh hak kontrol perusahaan maka terjadi perubahan konflik dari prinsipal dengan manajemen menjadi pemegang saham minoritas dan mayoritas (Bhasin, 2010).

Menurut Cahyani dan Sanjaya (2014) masalah agensi tipe II ini sangat relevan untuk penelitian khususnya di Negara Asia termasuk di Indonesia, yang mana struktur kepemilikan perusahaannya adalah struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Agensi tipe II ini mendeskripsikan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki hak untuk mempengaruhi manajemen dalam menentukan arah keputusan perusahaan. Hak tersebut digunakan pemegang saham mayoritas untuk menguasai kebijakan perusahaan agar dapat mengeksploitasi hubungan bisnis perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Kondisi tersebut membuat pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang sulit untuk memaksimalkan kepentingan mereka sepanjang memiliki tujuan yang bertentangan dengan pemegang saham mayoritas (Larasdiputra *et al.*, 2019). Selain masalah keagenan tipe I dan II terdapat permasalahan keagenan tipe III pada permasalahan keagenan antara pemilik dana (kreditur) dan pengelola dana (debitur) (Villalonga dan Amit, 2006).

Menurut Eisenhardt (2011:11) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu:

1. Pada umumnya manusia lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang

(*bounded rationality*).

3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan sifat dasar manusia ini, manajer sebagai manusia akan bertindak lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal seperti ini akan menyebabkan suatu kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) antara manajer dan pemegang saham. Dalam kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, manajer memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajer memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan investor.

Menurut Jensen (1976) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan tersebut, yaitu:

1. *Moral hazard* adalah permasalahan yang timbul apabila *agent* (manajer) tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection* adalah terdapat suatu keadaan dimana *principal* (investor) tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh *agent* (manajer) benar-benar berdasarkan informasi yang didapatnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Dengan demikian *corporate governance* diharapkan mampu dalam mengatasi konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham untuk mencegah terjadinya kecurangan pada laporan keuangan.

2.2 Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* atau biasa yang kita sebut dengan tata kelola dimaksudkan untuk mengatur hubungan serta untuk mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi agar dapat segera diperbaiki (Triwahyuningtias, 2012).

Menurut Kurniawan (2012) *Good Corporate Governance* adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders-stakeholders* lain seperti pegawai, kreditor, dan karyawan.

Menurut Effendi (2009) *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama dalam mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Berdasarkan dari beberapa definisi *Good Corporate Governance* tersebut, maka tata kelola perusahaan merupakan hal penting untuk mencegah dan menghalangi manajer untuk melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Tata kelola yang buruk dan lemah dapat mengakibatkan *fraud* pada laporan keuangan seperti skandal akuntansi yang telah dibahas sebelumnya.

Menurut Razali *et al.* (2014), terdapat empat indikator dalam mengukur kualitas *corporate governance* yaitu: (1) ukuran dewan komisaris, (2) komposisi dewan komisaris independen, (3) komite audit, dan (4) efektivitas audit internal. Ke-empat

masing-masing memiliki peran yang penting dalam pengawasan kualitas maupun aktivitas perusahaan dalam pengelolannya.

Isu mengenai tata kelola ini sudah mulai mengemuka di Indonesia setelah ini mengalami masa krisis pada tahun 1998. Sejak saat itu baik pemerintah maupun investor memberikan perhatian khusus dalam praktek *corporate governance*. Sukses atau tidaknya perusahaan ini tergantung dari keputusan atau strategi yang diambil oleh perusahaan. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pengelolaan tata kelola yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* dan sebaliknya jika tata kelola perusahaan yang baik maka akan memberikan kontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan (Wicaksono, 2015).

Penerapan tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak luar. Menurut Brigham *et al.*, (2006) sinyal yang dimaksud adalah tindakan perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, serta pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif untuk mendorong perusahaan agar menggunakan sumber daya yang efisien.

Penerapan praktik tata kelola di Indonesia semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari peringkat ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Indonesia pada 2017 mengalami peningkatan menjadi 70,59 dari tahun 2015 yang sebesar

62,88. ACGS merupakan tolak ukur untuk menilai praktik *corporate governance* para emiten di negara Asia Tenggara dan merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum. Menurut Angela Simatupang selaku *Corporate Governance Expert* RSM Indonesia. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat praktik tata kelola yang baik dan pengungkapan lebih dipengaruhi oleh sikap dari manajemen puncak perusahaan daripada ukuran perusahaan.

Selain itu, ketersediaan peraturan yang lebih ketat juga berperan signifikan dalam penerapan praktik tata kelola yang baik seperti ditunjukkan oleh pencapaian lebih tinggi skor yang dibukukan emiten perbankan. Serta penilaian yang dilakukan oleh ASEAN CG Scorecard menggunakan prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu: (1) hak pemegang saham, (2) perlakuan setara antar pemegang saham, (3) peran pemegang saham, (4) keterbukaan informasi dan transparansi, serta (5) tanggung jawab dewan direksi atau komisaris (Boyke, 2018).

2.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (manajer). Kepemilikan ini dapat membantu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Hal ini dapat menyelaraskan kepentingan sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan.

Jensen (1976) menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Manajer yang sekaligus menjadi

pemegang saham secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga dengan nilai perusahaan yang ikut meningkat, maka nilai kekayaan sebagai individu pemegang saham akan ikut meningkat (Soliha et al., 2002).

2.2.2 Kepemilikan Instusional

Kepemilikan institusional adalah bentuk struktur kepemilikan lainnya selain kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga atau pihak institusi lain. Institusi yang dimaksud biasanya berbentuk entitas seperti bank, perusahaan asuransi, reksadana dan dana pensiun.

Laporan periodik merupakan laporan yang dipakai oleh investor institusional untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan aktivitas monitoring, dengan adanya laporan tersebut investor institusional memiliki kapabilitas untuk menganalisis laporan keuangan secara langsung dibandingkan dengan investor individual.

2.2.3 Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam tata Kelola perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organisasi perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah serta mengurangi tindakan manajer untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga investor memiliki kepercayaan untuk berinvestasi pada perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris diharapkan untuk bersikap

independen dan menaruh kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi juga kepentingan kelompok.

Berdasarkan ketentuan Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) secara umum dewan komisaris bertugas mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, menjamin pelaksanaan strategis perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Keefektifan dalam pengawasan dewan komisaris dipengaruhi oleh sifat independensi dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan KNKG (2006) fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai berikut:

1. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.
2. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitted decharge*) dari RUPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.

2.2.4 Rekomendasi Dewan Komisaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekomendasi diartikan sebagai hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasanya dengan surat) atau penyuguhan. Masih dengan sumber yang sama, rekomendasi juga dapat diartikan sebagai saran yang menganjurkan. Sementara, Kotler (2007) mengutarakan bahwa rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi. Berdasarkan definisi di atas, rekomendasi secara sederhana bisa disebut sebagai saran yang menganjurkan atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang.

Seperti yang telah dibahas, menurut KNKG salah satu fungsi pengawasan dewan komisaris adalah dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite. Dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional yang dibantu oleh beberapa komite sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Namun, umumnya komite yang dibuat adalah komite kompensasi atau remunerasi untuk badan eksekutif dalam

perusahaan, komite nominasi, dan komite audit. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional, disarankan agar komite-komite tersebut diisi dengan komisaris independen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 34/POJK.04/2014, komite nominasi dan remunerasi yang akan membantu memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris yang nantinya rekomendasi tersebut akan dibawa oleh dewan komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usulan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian anggota direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari dewan komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi atau komite nominasi, sedangkan untuk usulan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi atau kompensasi untuk dewan direksi dan kebijakan-kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari dewan komisaris atau komite remunerasi.

2.2.5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris adalah rapat yang dilakukan antar dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017, dewan komisaris wajib melaksanakan rapat dewan komisaris dengan mengundang direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Serta wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

selama setahun dan dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris.

Rapat dewan komisaris dipimpin oleh komisaris utama dan apabila komisaris utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komisaris yang telah dipilih melalui surat kuasa oleh komisaris utama atau anggota lainnya yang hadir dalam rapat tersebut. Tanpa mengadakan rapat, dewan komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah dengan ketentuan semua anggota dewan komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota dewan komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil oleh dewan komisaris dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah di dalam rapat dewan komisaris (Anonim, 2020).

2.3 Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent financial reporting*) dapat bersifat finansial atau non finansial. Menurut ACFE (2014), kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material. Salah saji biasanya dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Menurut Molida (2011) bahwa kecurangan sengaja dilakukan oleh manajemen untuk memuaskan investor dan kreditur melalui laporan keuangan yang sesungguhnya menyesatkan. Menurut SAS No.99, kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara:

1. Manipulasi, perubahan catatan akuntansi, pemalsuan, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.

2. Kelalaian atau keliruan yang disengaja pada informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan didalamnya dapat menurunkan integritas informasi keuangan yang akan berdampak pada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Menurut Wells (2011), kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan adanya beberapa modus, yaitu:

1. Pemalsuan, pengubahan, atau manipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Kesalahan pencatatan material yang disengaja dengan cara penghapusan atau kesalahan presentasi dari akun, transaksi, kejadian atau informasi yang signifikan lainnya yang merupakan sumber informasi untuk pembuatan laporan keuangan.
3. Penghilangan informasi secara sengaja yang seharusnya disajikan dan diungkapkan terkait dengan prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.
4. Manipulasi dari praktek yang didasari oleh standar akuntansi yang memiliki celah bagi perusahaan untuk menutupi substansi ekonomi dari kinerjanya (Martantya dan Daljono, 2013).

Menurut Sukirman dan Sari (2013) imbalan yang diharapkan oleh para pelaku tindak kecurangan laporan keuangan adalah beragam. Imbalan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Dampak pada harga saham (Share-price effect):
 - a. Mengurangi gejala turun dan naiknya harga saham
 - b. Meningkatkan nilai perusahaan
 - c. Menurunkan biaya ekuitas
 - d. Meningkatkan nilai opsi saham
2. Dampak pada biaya pinjaman (Borrowing cost benefit):
 - a. Meningkatkan kualitas kredit
 - b. Rating utang jadi lebih tinggi
 - c. Biaya pinjaman lebih rendah
 - d. Kontrak keuangan lebih lunak
3. Dampak pada Bonus yang diperoleh (Bonus plan effect): Meningkatkan laba yang menjadi dasar pemberian bonus.
4. Dampak biaya politik (political cost effects): Menurunkan dampak regulasi dan menghindari pajak yang lebih tinggi.

Kecurangan laporan keuangan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kesempatan tanpa mengenal kedudukannya. Berdasarkan keterlibatannya, manajemen senior memiliki tingkat 72% kecurangannya pada posisi CEO sedangkan 43% pada posisi CFO, sedangkan karyawan yang bertanggungjawab pada anak perusahaan, divisi atau unit lain, mereka melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja yang buruk atau untuk mendapatkan bonus atas kinerja yang lebih tinggi. Apabila terjadi kecurangan, maka akan ada dampak yang timbul yaitu kurangnya tingkat kepercayaan dan akan merugikan para

pemangku kepentingan seperti kreditor, investor, karyawan, dan juga pemerintah. (Martantya, 2013).

2.4 Kerangka Teoritis

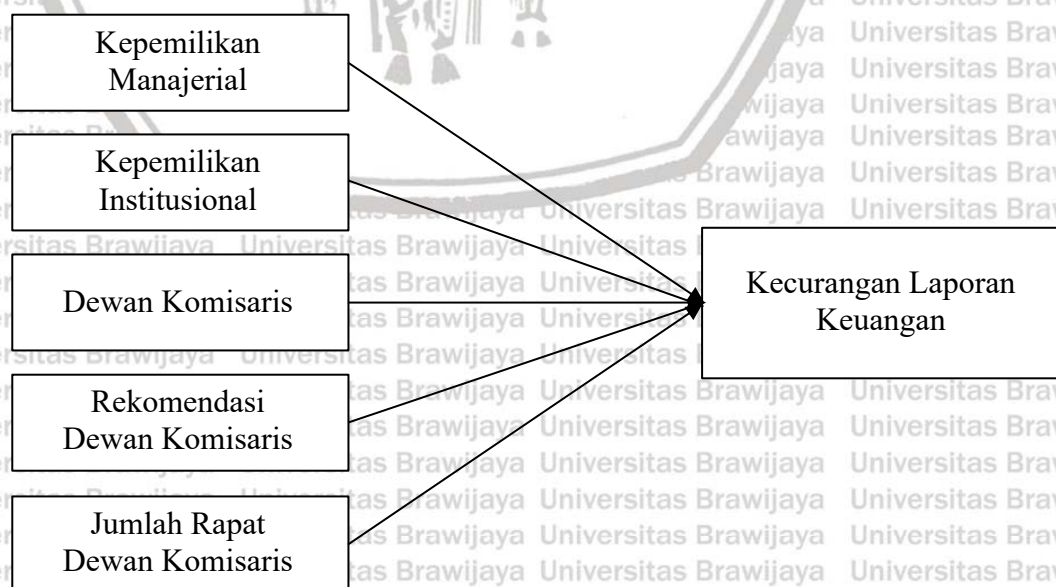
Kerangka teoritis adalah model konseptual mengenai teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014). Laporan keuangan yang baik seharusnya menyajikan informasi yang handal dan *reliable* bagi penggunaannya. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak laporan keuangan yang disajikan secara tidak transparan atau bahkan salah saji. Salah saji laporan keuangan biasanya terjadi karena dua hal yaitu *error* (kekeliruan) dan *fraud* (kecurangan). Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, maka dibuatlah kerangka teoritis, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)



2.5 Rumusan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial dilihat dari kepemilikan saham oleh orang dalam.

Kepemilikan saham ini dapat mengatasi permasalahan agensi, karena dengan adanya kepemilikan ini orang dalam akan mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham.

Menurut Jansen (1976) bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Adanya kepemilikan seperti ini, pihak manajer akan mendapat tekanan untuk lebih bertindak hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan mendapatkan motivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka bekerja sesuai dengan kepentingan principal.

Menurut penelitian Dwiputri (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham manajerial maka dapat membatasi sifat oportunistik dan adanya tindak kecurangan. Penelitian Chen *et al* (2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan saham yang dimiliki orang dalam, maka kemungkinan terjadinya tindak kecurangan laporan keuangan semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Jensen (1976), kepemilikan institusional dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik agensi. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat juga tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga dapat mengurangi tindak kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer.

Menurut penelitian Pristiwa (2019) kepemilikan konstitusional berpengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan, karena pihak institusi luar masih kurang aktif dalam mengawasi aktivitas manajer. Menurut penelitian Chen (2012) bahwa investor institusional akan memonitor tindak kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer.

Pada penelitian Budi (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Chantrataragul (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan yang dimiliki, maka akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik untuk mencegah tindak kecurangan pada laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.5.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Seperti yang telah dibahas dalam teori agensi, hubungan agensi terjadi apabila *principal* (investor) memperkerjakan *agent* (manajer). Pedelegasian tugas

dari investor kepada manajer ini membuat investor tidak dapat mengawasi manajer secara menyeluruh, sehingga hal tersebut dapat menciptakan kondisi asimetri informasi yang mana nantinya akan menimbulkan tindak kecurangan. Oleh karena itu, perlu adanya kehadiran dewan komisaris pada perusahaan. Dewan komisaris ini sendiri dibentuk untuk bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan serta untuk memastikan perusahaan tersebut telah melaksanakan dan menerapkan *corporate governance* dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut penelitian Salim (2017) dewan komisaris berpengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian Widodo *et al.* (2017), dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan pelaporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan menjadikan manajer untuk bertindak hati-hati dan transparan dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik serta meminimalisir manajer untuk bertindak kecurangan pelaporan keuangan (Jao dan Palugung, 2011). Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.5.4 Pengaruh Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Alzoubi dan Selamat (2012) berpendapat bahwa anggota dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam menentukan strategi dan tujuan organisasi serta menyelaraskannya dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, dewan

komisaris memiliki peranan yang penting mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Namun pada praktiknya dewan komisaris sering sekali tidak menjalankan tugasnya, sehingga peran dewan komisaris sering dianggap tidak penting dalam perusahaan sehingga dapat menimbulkan tindak kecurangan pada laporan keuangan akibat pengawasan yang kurang. Oleh karenanya, dibutuhkan dewan komisaris yang memiliki integritas dan kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Terkait dengan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris diperbolehkan untuk membuat komite-komite yang dilandaskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Salah satu komite yang membantu dewan komisaris dalam membuat rekomendasi adalah komite remunerasi dan nominasi. Berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 komite remunerasi dan nominasi memiliki tanggung jawab dan membantu dewan komisaris untuk membuat rekomendasi terkait pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian anggota direksi serta rekomendasi kenaikan gaji atau kompensasi lainnya.

Menurut peraturan yang ada pada POJK, komite remunerasi dan nominasi harus diisi dengan komisaris independen agar dapat bekerja dengan efektif dan objektif, sehingga rekomendasi yang diberikan bersifat objektif dan tidak adanya keberpihakan atau kecurangan, karena semua rekomendasi yang ada akan ditampung dan disampaikan oleh dewan komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Yosefin (2019) dalam menjalankan fungsinya, komite remunerasi dan nominasi perlu melakukan *Enterprise Risk Management* (ERM)

untuk mengurangi dan menghindari hal-hal berisiko yang dapat membahayakan keberlangsungan ataupun kinerja perusahaan serta mempekerjakan penasihat (*advisor*) dari pihak eksternal perusahaan yang langsung melapor pada Komite Kompensasi. Agar lebih meminimalisir adanya tindak kecurangan pada perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Rekomendasi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.5.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Rapat dewan komisaris merupakan sarana atau media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Menurut POJK Nomor 57/POJK.04/2017 rapat paling sedikit diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama setahun. Jumlah rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam mengambil keputusan Bersama terkait dengan kebijakan perusahaan (Ariningtika dan Kiswara, 2013). Dengan semakin seringnya rapat dilakukan oleh dewan komisaris maka diharapkan peran dan tindak pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan efektif. Oleh karena itu, tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dapat dihindari dan diminimalisir.

Chen et al. (2006) menyatakan bahwa dengan seringnya dewan komisaris melakukan rapat, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, karena pertemuan yang sering ini dapat membuat dewan komisaris untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan

masalah yang potensial terjadi terutama terkait dengan kualitas laporan keuangan.

Namun pada penelitian Marsha (2017) menentukan hasil yang sebaliknya bahwa

jumlah rapat dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap tindak

kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis

sebagai berikut:

Hs: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) populasi merupakan sebuah kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi atau teliti oleh peneliti.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan oleh peneliti sebagai objek untuk meneliti. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang telah terdaftar di BEI.

Sampel penelitian dipilih dan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria yang di tentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan publik yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.
2. Perusahaan yang menjadi sampel tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian.
3. Memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap.
4. Perusahaan publik dibidang manufaktur yang menggunakan nilai mata uang rupiah.

3.2 Data Penelitian dan Sumbernya

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Sugiyono (2013:7) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu karena menitikberatkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan publik yang telah di audit dan dipublikasikan. Data tersebut diperoleh melalui situs www.idx.co.id (BEI).

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan sendiri. Data bisa diperoleh dengan berbagai cara dan dari sumber yang berbeda. Pemilihan teknik pengumpulan data tergantung pada fasilitas yang tersedia, tingkat akurasi yang diisyaratkan, keahlian peneliti, kisaran waktu studi, biaya, dan sumber daya lain yang berkaitan dan tersedia untuk pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data-data yang digunakan terdapat pada dokumen-dokumen yang telah ada, yaitu *annual report* tahun 2017-2019 yang dapat diakses di situs resmi BEI (<http://www.idx.co.id>). Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel *nonrandom* karena penelitian menggunakan keseluruhan populasi penelitian yang telah memiliki kriteria tertentu.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penjelasan variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:38): “Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Definisi operasional variabel merupakan langkah yang harus diambil sebelum melakukan penilaian dan penelitian, hal ini dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Penggunaan *fraud score model*, atau yang lebih dikenal dengan F-Score dapat menentukan rata-rata F-Score dan standar deviasinya untuk penerapannya di berbagai negara, ataupun berbagai sektor dalam negara yang sama. Model F-Score merupakan penjumlahan dari dua variabel yaitu kualitas akrual dan kinerja keuangan (Skousen & Twedt, 2009 yang dikutip oleh Ismawati, 2019), yang digambarkan dengan persamaan berikut:

$$F\text{-Score} = \text{Accrual Quality} + \text{Financial Performance}$$

Kualitas akrual (*Accrual Quality*) diproksikan dengan RSST Accrual, yang dihitung dengan rumus:

$$RSST \text{ Accrual} = \frac{\Delta WC + \Delta NCO + \Delta FIN}{\text{Average Total Asset}}$$

Keterangan:

$$WC \text{ (Working Capital)} = (\text{Current Assets} - \text{Current Liability})$$

NCO (*Non Current Operating Accrual*) =

$$(Total\ Assets - Current\ Assets - Investment\ and\ Advances) - (Total\ Liabilities - Current\ Liabilities - Long\ Term\ Debt)$$

FIN (*Financial Accrual*) = $Total\ Investment - Total\ Liabilities$

ATS (*Average Total Assets*) = $(Beginning\ Total\ Asset + End\ Total\ Assets) : 2$

Kinerja keuangan (*Financial Performance*) diproksikan dengan perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan penjualan tunai, dan perubahan pada *earning before interest and tax* (EBIT). Rumus *financial performance* adalah sebagai berikut:

$$Financial\ Performance = change\ in\ receivable + change\ in\ inventories + change\ in\ cash\ sales + change\ in\ earnings$$

Keterangan:

$$Change\ in\ receivables = \frac{\Delta Receivables}{Average\ Total\ Assets}$$

$$Change\ in\ inventories = \frac{\Delta inventories}{Average\ Total\ Assets}$$

$$Change\ in\ cash\ sales = \frac{\Delta Sales}{Sales\ (t)} - \frac{\Delta Receivables}{Receivables\ (t)}$$

$$Change\ in\ earning = \frac{Earning\ (t)}{Sales\ (t)} - \frac{Earning\ (t - 1)}{Average\ Total\ Assets\ (t - 1)}$$

Perusahaan dapat diprediksi melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan jika nilai *fraud score* model tersebut lebih dari 1, sedangkan jika nilai *fraud score* model kurang dari 1 maka perusahaan tersebut tidak dapat diprediksi melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel tidak terikat (bebas) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Baik berpengaruh positif Pada penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yaitu proposi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit.

Keempat variabel tersebut merupakan variabel-variabel proksi dari tata kelola yang merupakan indikator dalam mengukur kualitas tata kelola pada suatu perusahaan.

1. Kepemilikan Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (manajer). Kepemilikan ini dapat membantu menyatukan dan menyelaraskan kepentingan. Variabel kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2. Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan institusional merupakan bentuk struktur kepemilikan lainnya selain kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi. Investor institusi memiliki peran penting dalam pengawasan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Sehingga dengan adanya keberadaan investor institusi, manajer akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta akan meminimalisir kemungkinan tindak kecurangan pada lamporan keuangan yang dilakukan oleh

manajer Joesmana dan Hudiwinarsih (2017). Variabel kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

3. Dewan Komisaris (DK)

Dewan komisaris secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Kepemilikan aset, kemampuan manajemen operasi juga dapat mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan, sehingga diperlukan suatu dewan komisaris yang mampu untuk mengontrol jalannya perusahaan, juga mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan tindak kecurangan (Siwi, 2016). Variabel dewan komisaris dihitung dari jumlah banyaknya dewan komisaris pada perusahaan tersebut, sebagai berikut:

$$DK = \Sigma \text{ Dewan Komisaris}$$

4. Rekomendasi Dewan Komisaris (RDK)

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dibantu dengan komite-komite yang dibuatnya. Salah satu komite yang membantu dewan komisaris dalam membuat rekomendasi adalah komite nominasi dan remunerasi. Rekomendasi yang dibuat oleh komite nominasi dan remunerasi biasanya berupa surat atau penyuguhan yang diberikan kepada dewan komisaris, yang nantinya rekomendasi tersebut akan dibahas dengan dewan komisaris pada saat RUPS. Penilaian yang diberikan oleh komite nominasi dan remunerasi harus secara objektif dan profesional, maka dari itu komite ini harus diisi dengan anggota komisaris independen agar dapat mengurangi terjadinya tindak kecurangan dan

penilaian secara subjektif yang nantinya akan berdampak kepada rekomendasi yang diberikan oleh dewan komisaris untuk perusahaan. Variabel rekomendasi dewan komisaris dihitung dari jumlah banyaknya rekomendasi dewan komisaris pada perusahaan tersebut, sebagai berikut:

$$RDK = \frac{\text{Jumlah rekomendasi dewan komisaris}}{\text{jumlah rekomendasi sesuai aturan OJK}}$$

5. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki penting dalam suatu perusahaan dan memiliki tugas kepemilikan aset, kemampuan manajemen operasi juga dapat mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan, sehingga diperlukan suatu dewan komisaris yang mampu untuk mengontrol jalannya perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin baik (Marsha, 2017). Variabel kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan rumus:

$$JRDK = \sum \text{Jumlah Rapat Dewan Komisaris}$$

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 23.

Analisis data pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, asumsi klasik dan analisis linier berganda. Dalam penelitian ini, analisis hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tindakan kecurangan akuntansi pada perusahaan publik Di Indonesia.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran atau deskripsi suatu data. Alat analisis yang digunakan pada statistik deskriptif adalah rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Metode analisa ini digunakan untuk melihat setiap karakteristik dari data yang akan digunakan.

3.4.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda. Metode ini dilakukan untuk melihat atau memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Perumusan model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FS = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 DK + \beta_4 RDK + \beta_5 JRDK + e$$

Keterangan:

FS = Kecurangan laporan keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien variabel

KM = Kepemilikan manajerial

KI = Kepemilikan institusional

DK = Dewan komisaris

RDK = Rekomendasi Dewan Komisaris

JRDK = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

e = Error

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka dari itu untuk memenuhi syarat sebelum melakukan uji hipotesis melalui uji T dan uji F, perlu dilakukan uji klasik terlebih dahulu. Dalam uji klasik ini akan dilakukan beberapa tahap, yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* dan grafik histogram dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016:110). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolineritas adalah dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance*

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2016).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2016). Apabila residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya berbeda atau errornya tidak identik maka disebut Heterokedastisitas dan apabila sama atau errornya identik maka disebut Homokedastisitas. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada titik menyebar dan pola yang jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5 Uji One Sample T-Test

One Sample T-Test berlaku pada satu sampel dan bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Pengujian beda rata-rata yang menggunakan satu sampel mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Pada prinsipnya, pengujian satu sampel ingin menguji apakah suatu nilai tertentu (sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah

tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pada umumnya, nilai tertentu di sini adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi.

One Sample T-Test ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Adapun langkah – langkah *One Sample T-Test* adalah:

1. Perumusan hipotesis pada uji *One Sample T-Test* :

H_0 : Perusahaan publik di Indonesia tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan.

H_1 : Perusahaan publik di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan.

2. Kriteria Penerimaan

H_1 ditolak jika μ_1 (rata-rata nilai F-Score) $< 0,5$

H_1 diterima jika μ_1 (rata-rata nilai F-Score) $< 0,5$

P value (sig) $< \alpha$ (0,05)

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara variabel independen yaitu tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, rekomendasi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris dengan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri tiga uji antara lain uji kelayakan model (*goodness of fit*), koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis t . Masing-masing uji hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1 Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)

Uji Kelayakan Model digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2016).

Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $F \geq 0,05$ menunjukkan bahwa model penelitian tidak *fit*.
2. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ menunjukkan bahwa model *fit*.

3.6.2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Pengujian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu likuiditas, profitabilitas dan *leverage* secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen yaitu nilai perusahaan.

Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independen.

3.6.3 Uji Hipotesis t (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengukur pengaruh signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05. Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan bahwa penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%.

Adapun analisis yang dilakukan berdasarkan perbandingan antar nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t \geq 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.
2. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Penyampelan Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut juga *Indonesian Stock Exchange* (IDX) merupakan suatu perseroan terbatas swasta yang sahamnya dimiliki oleh anggota bursa dan mendapat izin operasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI merupakan institusi yang terpusat sebagai sarana untuk mempertemukan kekuatan penawaran dan permintaan efek. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan. Objek yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar dan masih aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Dalam penelitian ini, sampel yang akan digunakan adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut juga *Indonesian Stock Exchange* (IDX) merupakan suatu perseroan terbatas swasta yang sahamnya dimiliki oleh anggota bursa dan mendapat izin operasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang ditentukan pada BAB 3. Kriteria atau pertimbangan dalam pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Teknik Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.	677
Perusahaan yang tidak bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.	(526)
Perusahaan yang menjadi sampel yang mengalami <i>delisting</i> selama periode penelitian.	(11)
Tidak memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap.	(83)
Perusahaan publik dibidang manufaktur yang tidak menggunakan nilai mata uang rupiah.	(17)
Jumlah Sampel	40

Sumber: www.idx.co.id, 2020

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut di dapat 40 perusahaan yang menjadi sampel akhir yang akan di jadikan sampel penelitian. Data keuangan diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit dan kinerja keuangan perusahaan sampel selama tahun 2017-2019, sehingga dilakukan 120 observasi.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara umum mengenai variabel dalam penelitian serta untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebelum digunakan dalam analisis regresi berganda. Hasil pengolahan data statistik deskriptif dapat di lihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Kecurangan Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FS	120	-2.362	.313	-.676	.562
KM	120	.000	.736	.108	.160
KI	120	.019	1.687	.667	.275
DK	120	3	12	6.30	2.085
RDK	120	1.000	5.333	2.538	.948
JRDK	120	3	14	7.75	2.870
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Lihat Lampiran 3

Berdasarkan pada Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan perbandingan rata-rata dengan standar deviasi setiap variabel dari total 120 sampel.

Data dalam statistik deskriptif tersebut menunjukkan KM, memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibanding standar deviasinya. Ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal karena terdapat outlier yang disebabkan oleh tingginya selisih antara nilai positif dan negatif pada masing-masing variabel.

Selisih tinggi dari data tersebut terjadi karena adanya nilai 0,000 yang terlalu besar ini terjadi karena jumlah saham yang di miliki manajer relatif kecil dibandingkan jumlah saham beredar. Selain itu jumlah kepemilikan manajerial dari seluruh sampel perusahaan memiliki selisih yang terlalu besar, hal ini yang menyebabkan outlier data pada beberapa sampel penelitian sehingga harus dilakukan transformasi data untuk memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperoleh hasil yang baik maka data *outlier* yang ada harus dihilangkan. Data *outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Setelah data outlier dihilangkan maka data yang semula 120 data menjadi 100 data.

4.3 Hasil Uji *One Sample t Test*

Untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan publik ada yang melakukan kecurangan pada laporan keuangan dilakukan dengan metode pengujian *One Sample T-Test*. Dengan pengujian tersebut akan terlihat perbedaan secara signifikan atau tidak antara perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan setiap tahunnya. Ketentuan untuk pengambilan keputusan bila signifikansi $< 0,05$ serta nilai rata-rata $f\text{-score} > 0,5$ dan atau nilai rata-rata maka hipotesis pertama (H1) diterima.

Tabel 4.3 *One Sample T Test*

Periode Pengamatan	N	Mean	Sig. (2-tailed)
F-Score tahun 2017	40	-.455	.086
F-Score tahun 2018	40	-.331	.078
F-Score tahun 2019	40	-.342	.082

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa:

1. Pada tahun 2017 diperoleh nilai *mean* atau rata-rata sebesar -0,455 dan nilai signifikan sebesar 0,086. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tidak terbukti secara signifikan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan di tahun 2017 karena nilai rata-rata $0,455 < 0,5$ dan nilai signifikansi $0,086 > 0,05$.
2. Pada tahun 2018 diperoleh nilai *mean* atau rata-rata sebesar -0,331 dan nilai signifikan sebesar 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tidak terbukti secara signifikan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan di tahun 2018 karena nilai rata-rata $0,331 < 0,5$ dan nilai signifikansi $0,078 > 0,05$.

0,05.

3. Pada tahun 2019 diperoleh nilai *mean* atau rata-rata sebesar -0,342 dan nilai signifikan sebesar 0,082. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tidak terbukti secara signifikan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan di tahun 2019 karena nilai rata-rata $0,455 < 0,5$ dan nilai signifikansi $0,082 > 0,05$.

4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai variabel Tata Kelola Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (FS). Data yang diperoleh dari hasil observasi di dapat dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF	Keterangan
1 (Constant)	.905	.262	3.458	.001**			
KM	.019	.048	.385	.701	.841	1.189	Ditolak
KI	-.123	.059	-2.073	.040**	.793	1.260	Diterima
DK	-.698	.334	-2.092	.038**	.907	1.103	Diterima
RDK	-1.606	.902	-1.781	.082*	.889	1.124	Diterima
JRDK	.013	.108	.123	.902	.721	1.386	Ditolak
F-Statistik			17.232	0.000**			
Nilai R ²				0.011			

** Sigifikan pada level 5% * Signifikan pada level 10%

Sumber: Lihat Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.4, maka penjelasan kecurangan laporan keuangan dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$FS = 0,905 + 0,019KM - 0,123KI - 0,698DK - 1,606RDK + 0,013JRDK + e$$

Penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah nilai koefisien Kepemilikan Manajerial dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah terhadap variabel Kecurangan Laporan Keuangan. Sedangkan variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan Rekomendasi Dewan Komisaris memiliki koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak searah terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat bahwa variabel KI dan DK memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha < 0,05$), variabel RDK memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 ($\alpha < 0,10$) serta variabel KM dan JRDK memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,1 ($\alpha > 0,10$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris dan rekomendasi dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 17,232 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa model fit. Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,011 atau 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Institusional (KI), Dewan

Komisaris (DK), Rekomendasi Dewan Komisaris (RDK) dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) menjelaskan variabel Kecurangan Laporan Keuangan (FS) adalah sebesar 1,1% sedangkan sisanya 98,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

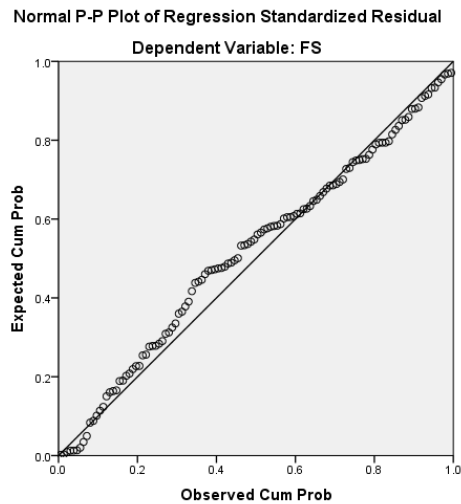
Persamaan regresi ini dapat digunakan karena telah memenuhi persyaratan untuk uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji normalitas dan uji heterokedastisitas pernyataan ini juga didukung oleh bukti nilai TOL dan VIF pada

Tabel 4.4 serta grafik histogram, normal p-plot, dan scatterplot berikut ini:

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai $TOL > 0,10$ dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai $VIF < 10$. Maka dapat disimpulkan bahawa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

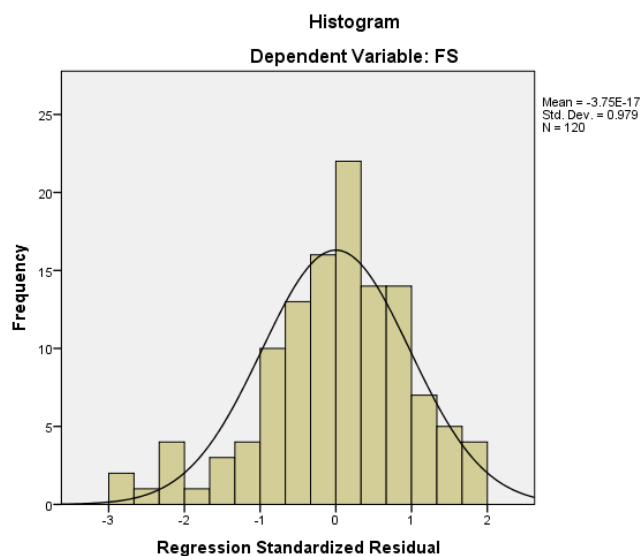
Hasil uji normalitas pada 120 sampel dapat dilihat dari Gambar 4.1 *Normal P-Plot Regression Standardized* sebagai berikut:



Sumber: Lihat Lampiran 6

Gambar 4.1 Grafik Normal P. P Plot Regresi Kecurangan Laporan Keuangan

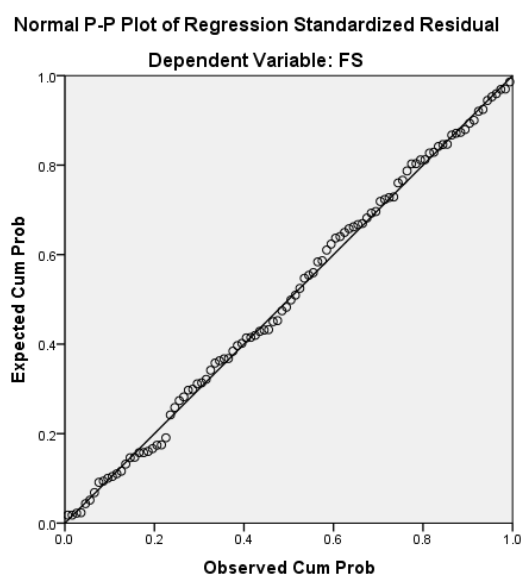
Berdasarkan pada gambar 4.1 Normal P. P Plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak menyebar disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Sumber: Lihat Lampiran 6

Gambar 4.2 Grafik Histogram Regresi Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan grafik tersebut menggambarkan bahwa distribusi data untuk parameter regresi kecurangan laporan keuangan ini terdistribusi secara tidak normal karena dapat dilihat bahwa grafik yang tidak sama antara sisi kanan dan kiri. Untuk memperoleh hasil yang baik maka data *outlier* yang ada harus dihilangkan. Setelah data outlier dihilangkan maka data yang semula 120 data menjadi 100 data. Hasil pengujian normalitas yang kedua ditunjukkan pada Gambar 4.3, yaitu sebagai berikut:

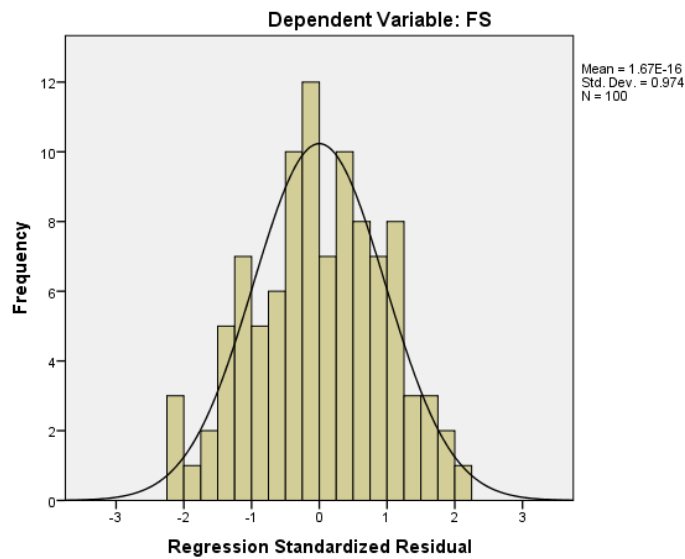


Sumber: Lihat Lampiran 6

Gambar 4.3 Grafik Normal P. P Plot Data 100 Sampel

Berdasarkan pada Gambar 4.2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hal ini diperkuat dari grafik hitogram dengan 100 sampel sebagai berikut:

Histogram

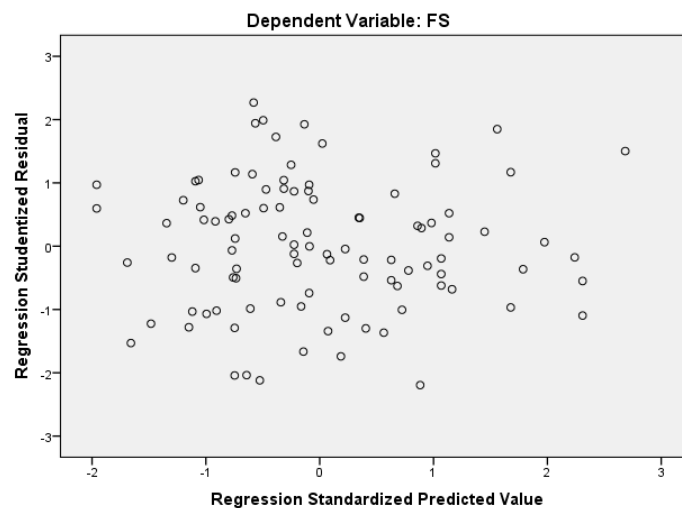


Sumber: Lihat Lampiran 6

Gambar 4.4 Grafik Histogram Data 100 Sampel

Grafik tersebut menggambarkan bahwa distribusi data untuk parameter regresi kecurangan laporan keuangan dengan data 100 sampel ini terdistribusi secara normal dengan melihat grafik yang sama antara sisi kanan dan kiri.

Scatterplot



Sumber: Lihat Lampiran 6

Gambar 4.5 Scatterplot Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan Gambar 4.5 scatterplot kecurangan laporan keuangan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Hasil Penelitian

Uraian berikut ini tentang pembahasan tentang hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil perhitungan Uji t diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai pengaruh berikut:

4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan pada Tabel 4.4 hasil penelitian menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) yang mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan manajerial dengan kecurangan laporan keuangan, yang berarti bahwa besar kecilnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada perusahaan tidak akan mempengaruhi besar kecilnya kecurangan laporan keuangan.

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini menggunakan alat ukur kepemilikan manajerial, yang berarti bahwa jumlah kepemilikan saham oleh orang dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi diharapkan menjadikan manajer bekerja lebih proaktif dalam mengelola perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham dan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, kepemilikan manajerial yang tinggi diharapkan akan

lebih bertindak hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan karena akan berdampak terhadap perusahaan secara langsung.

Namun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam struktur pemegang saham akan menyebabkan rawan tindakan yang lebih mementingkan kepentingan manajer dari pada kepentingan pemegang saham. Hal tersebut dapat terjadi karena masih sangat rendah saham yang dimiliki setiap perusahaan dilihat dari statistik deskriptif nilai rata-rata kepemilikan manajerial sangat rendah dan masih banyak manajer yang tidak memiliki saham pada setiap perusahaan sehingga saham yang dimiliki manajer belum bisa untuk mengatasi atau meminimalkan terjadinya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan manajer.

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan pada Tabel 4.4 hasil penelitian menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrian Budi (2016) yang mengemukakan ada hubungan antara kepemilikan institusional dengan kecurangan laporan keuangan, yang berarti bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi besar kecilnya tindakan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik

agensi. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat juga tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga dapat mengurangi tindak kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak baik bagi perusahaan, selain menanamkan investasi yang cukup banyak, seorang pemegang saham mayoritas juga turut membantu dalam peningkatan pengawasan operasional perusahaan. Hal tersebut terjadi karena pemegang saham mayoritas tidak mudah percaya pada praktik manipulasi laba dalam pengambilan keputusan. Pemegang saham mayoritas juga melakukan monitoring pada pengawasan aktivitas perusahaan untuk menjamin kemakmuran para pemegang saham.

4.5.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan pada Tabel 4.4 hasil penelitian menemukan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim (2017) serta Widodo Arief dan Muchammad (2017) yang mengemukakan ada hubungan antara dewan komisaris perusahaan dengan kecurangan laporan keuangan, yang berarti bahwa besar kecilnya ukuran dewan komisaris pada perusahaan akan meminimalis tindakan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan di sebabkan karena pada dasarnya tugas dan wewenang komisaris adalah mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris juga membuat rekomendasi saran perbaikan atas hasil penelaahan kinerja perusahaan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dewan komisaris di tunjuk dan diberhentikan oleh (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris maka akan dapat meminimalis kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan pada laporan keuangan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dibentuk untuk diberikan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi kualitas informasi pada pelaporan keuangan. Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik. Oleh karena itu adanya dewan komisaris akan menjaga perusahaan berjalan dengan memenuhi seluruh aturan yang berlaku.

4.5.4 Pengaruh Rekomendasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Kecurangan

Laporan Keuangan

Berdasarkan pada Tabel 4.4 hasil penelitian menemukan bahwa Rekomendasi Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rekomendasi dewan komisaris dapat menghentikan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dewan komisaris memiliki peranan

yang penting mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Rekomendasi dewan komisaris memiliki hubungan yang negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya semakin tinggi rekomendasi dewan komisaris maka akan menjamin perusahaan dalam menjalankan perusahaan dengan benar sehingga tidak melakukan tindak kecurangan. Rekomendasi dewan komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan disebabkan karena jumlah dewan komisaris melebihi rekomendasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) artinya banyak dewan komisaris yang dipekerjakan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi dewan komisaris akan membantu perusahaan dan memberikan pengawasan terhadap manajemen yang bertindak oportunistik sehingga perusahaan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semakin tinggi rekomendasi dewan komisaris maka semakin banyak yang bekerja dalam memberikan pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi dan menghindari hal-hal berisiko yang dapat membahayakan keberlangsungan ataupun kinerja perusahaan.

4.5.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan pada Tabel 4.4 hasil penelitian menemukan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan

Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsha dan Ghozali (2017) yang mengemukakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh pada manajemen laba. Artinya sering tidaknya dewan komisaris melakukan rapat tidak mempengaruhi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, sehingga perusahaan akan tetap melakukan praktik manajemen laba yang tujuannya untuk kepentingan perusahaan pribadi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan pendapat Chen *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa dengan seringnya dewan komisaris melakukan rapat, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, karena pertemuan yang sering ini dapat membuat dewan komisaris untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial terjadi terutama terkait dengan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marsha dan Ghozali (2017) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap tindak kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah badan yang bersifat paruh waktu yang hanya bertemu atau melakukan pertemuan dan tidak saling mengenal dengan baik satu sama lain dan dewan komisaris tidak memiliki waktu dan keahlian yang diperlukan untuk memahami secara rinci bisnis perusahaan yang memungkinkan manajemen untuk mengaburkan masalah. Sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.



BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa kepemilikan manajerial dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena masih sangat rendahnya kepemilikan saham manajerial yang dimiliki setiap perusahaan sehingga tidak terjadi kecurangan laporan keuangan serta jumlah rapat dewan komisaris yang relatif kecil setiap tahun sehingga tidak mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris dan rekomendasi dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pemegang saham institusional dan dewan komisaris melakukan monitoring pada pengawasan aktivitas perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada laporan keuangan, serta menjamin kemakmuran para pemegang saham sehingga tidak terjadi kecurangan laporan keuangan. Selain itu rekomendasi dewan komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan karena seluruh sampel penelitian memiliki jumlah dewan komisaris lebih besar dari rekomendasi

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan yang bisa disampaikan yaitu, penelitian ini juga menggunakan *F-Score* dalam mengukur adanya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan. Alat ukur ini masih jarang digunakan di Indonesia sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini belum dapat menangkap secara utuh faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi yang masih rendah yaitu sebesar 1,1%. Artinya masih terdapat 98,9% variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti yaitu, diharapkan dapat menambah jumlah sampel dengan memperluas ruang lingkup penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar dapat digeneralisasikan pada sektor perusahaan yang berbeda. Serta Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah periode pengamatan penelitian yang lebih lama agar dapat menunjukan kondisi/pola yang sesungguhnya.

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor internal dan eksternal lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor internal

antara lain seperti variabel kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, kurs mata uang, dan situasi sosial politik (Marsha, 2017).



DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018). Report to the nation: Occupational Fraud and Abuse. Diakses dari *website* ACFE: <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/>.

Alzoubi, E. S. S., and Selamat, M. H. 2012. The Effectiveness Of Corporate Governance Mechanisms On Constraining Earning Management: Literature Review And Proposed Framework. *International Journal of Global Business*, Vol. 5, No. 1, h. 17-35.

Anonim, 2020. *YLKI Catat Pengaduan Capai 1871 di 2019, Terbanyak Kasus Perbankan*. Diakses dari *Website* Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4155149/ylki-catat-pengaduan-capai-1871-di-2019-terbanyak-kasus-perbankan#:~:text=Ketua%20Pengurus%20Harian%20YLKI%2C%20Tulus,perbankan%20yakni%20mencapai%20106%20kasus.>

Anonim, 2020. Tata Kelola yang Baik. Diakses dari *website* Delta Dunia: <https://deltadunia.com/id/tentang/tata-kelola-yang-baik/dewan-komisioner/>.

Angga dan Africano, Fernando. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Terhadap Pelanggaran Peraturan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Financial yang Melakukan Pelanggaran Peraturan Keuangan Bapepam tahun 2013-2015).

Arinigtika, Predesta dan Kiswara , Endang. 2013. Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Diponegoro* Vol 2, No 2.

Budi, Adrian. 2016. Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*.

Candra, Erlita. (2019). Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi FEB UM Surakarta*.

Chen, Jean J. dan H. Zhang. 2012. The Impact of the Corporate Governance Code on Earnings Management: Evidence from Chinese Listed Companies. Hal. 1–62.

Chantrataragul, Dusadee, 2007. Political Connection and Ownership Concentration:

Evidence from Thailand. Master of Science Program in Finance, *Faculty of Commerce and Accountancy*. Bangkok: *Thammasat University*.

Chtourou, S. M., Jean Bedard dan Lucie Courteau. 2001. Corporate Governance and Earnings Management. *Working Paper*.

Donald. (2018). *Drama Bank Bukopin: Kartu Kredit Modifikasi dan Rights Issue*. Diakses dari website CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180427144303-17-12810/drama-bank-bukopin-kartu-kredit-modifikasi-dan-rights-issue>.

Earning, Oktita. (2013). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* dan *Financial Indicators* terhadap Kondisi *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*.

Gil, Amarjit dan Obradovich, John. 2012. The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 91 (2012), 46-56.

Hapsoro, Dody. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja

Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol.19, No. 3, Desember 2008.

Idris, Muhammad. (2019). *Sulap Lapkeu, Mantan Dirut Hanson Internasional Didenda Rp5M*. Diakses dari website CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190809145515-92-419879/sulap-lapkeu-mantan-dirut-hanson-international-didenda-rp5-m>.

Ismawati, Dwi. (2019). Analisis Fraud Pentagon Pada Financial Statement Fraud menggunakan Benish M-Score dan F-Score. Di akses dari <http://eprints.peradaban.ac.id/id/eprint/575>

Jao, Robert and Gagaring Palugung. 2011. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (1): 43-54.

KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari website: <http://kbbi.web.id/pusat>.

Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*. Edisi 14 John Wiley and Sons, Inc.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No: Kep29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.

Kotler, Philip dan Lane Keller. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Erlangga. Jakarta

KNKG. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia.

Larasdiputra *et al.* (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Pada Konservatisme Akuntansi. *E-Journal Universitas Warmadewa*. Vol. 18. No.1.

Lestari. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 2.

Maharani, Shinta Annisa. (2019). Analisis *Fraud Pentagon Theory* Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*. Vol. 7, No.1.

Mardianto & Tiono, Carissa. (2019). Analisis Pengaruh *Fraud Triangle* dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan.

Martantya dan Daljono. 2013. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang (Studi Kasus pada Perusahaan yang Mendapat Sanksi dari Bapepam Periode 2002-2006). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2 No.3.

Maryanah dan Amilin, 2011. Pengaruh Corporate Governance dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Akuntabilitas Online*.

Molida, Resti. 2011. Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need, dan Ineffective Monitoring pada Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1 No.17: 157-172.

Nauval, Muhammad. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan *Financial Statement Fraud* dalam Perspektif *Fraud Triangle* (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*. Vol. 3, No.2.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Priswita, Feby & Takwa, Salma. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(4), Seri A, 1705-1722.

Pratiwi, Yuni. (2017). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif *Fraud Triangle* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Lampung*.

P, Boyke. 2018. Praktik Tata Kelola Di Indonesia Membaik. Diakses dari *website* wartaekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read186845/praktik-tata-kelola-perusahaan-di-indonesia-membaik>.

Rahmayuni, Sri. (2018). Analisis Pengaruh *Fraud Diamond* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6, No.1.

Rahmatika, Aulia. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawasan Syariah dan *No Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmiah FEB IAIN Surakarta*.

Rismawati. (2019). Analisis Tindakan Fraud dan Pencegahannya di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*. Vol. 7, No. 2.

Santosa, Setyarini., dan Ginting, Josep. 2019. Evaluasi Keakuratan Model Beneish M-Score Sebagai Alat Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Kasus Perusahaan Pada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Bijak* 16(2): 75-84

Santoso, Rudi Tri. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Merger di Indonesia (Tahun 1998-2010). *E-journal Universitas Sebelas Maret*.

Sam'ani. 2008. Pengaruh Good *Corporate Governance* Dan Leverage Terhadap Kinerja

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.

Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2007. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Siwi, Tri. 2016. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-journal Universitas PGRI Yogyakarta*.

Shinta. (2017). *Teori Fraud Triangle*. Diakses dari website Dictio.id: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-fraud-triangle/14386>.

Shinta, Dwi. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah UNIP*.

Sukirman dan Sari, Maylia Pramono. 2013. Model Deteksi Kecurangan berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik di Indonesia), *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol 9. No.2.

Skousen *et al.* 2009. Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99. Corporate Governance and Firm Performance. *Advances in Financial Economics*, Vol. 13.

Tessa, Chyntia. (2016). *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon* pada Sektor Keuangan dan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah UNIP*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Villalonga, B., dan Amit, R. 2006. How Do Family Ownership, Management, and Control Affect Firm Value? *Journal of Financial Economics*. Vol. 80.

Wicaksono, Satrio. (2015). Mekanisme *Corporate Governance* dan Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah UNIP*.

Yosefin (2019). Komite Nominasi dan Remunerasi Di Perusahaan Indonesia untuk Pelaksanaan *Enterprise Risk Management (ERM)* yang lebih baik. *E-Journal CRMS*.

Lampiran 1. Perusahaan Manufaktur yang diajarkan sampel

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE
1	PT. Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
2	PT. Asiaplast Industries Tbk	APLI
3	PT. Astra International Tbk	ASII
4	PT. Astra Otoparts Tbk	AUTO
5	PT. Sepatu Bata Tbk	BATA
6	PT. Barito Pacific Tbk	BRPT
7	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
8	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
9	PT. Dutra Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS
10	PT. Ekadharma International Tbk	EKAD
11	PT. Gudang Garam Tbk	GGRM
12	PT. HM Sampoerna Tbk	HMSP
13	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
14	PT. Indofarma Tbk	INAF
15	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
16	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	INTP
17	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk	KAEF
18	PT. Kabelindo Murni Tbk	KBLM
19	PT. Kalbe Farma Tbk	KLBF
20	PT. Lion Metal Works Tbk	LION
21	PT. Lionmesh Prima Tbk	LMSH
22	PT. Merck Tbk	MERK
23	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR
24	PT. Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO
25	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
26	PT. Sido Muncul Tbk	SIDO
27	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT
28	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB
29	PT. Semen Indonesia Tbk	SMGR
30	PT. Selamat Sempurna Tbk	SMSM
31	PT. Siantar Top Tbk	STTP
32	PT. Mandom Indonesia Tbk	TCID
33	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	TKIM
34	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
35	PT. Trias Sentosa Tbk	TRST
36	PT. Tempo Scan Pacific Tbk	TSPC
37	PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk	ULTJ

38	PT. Unilever Indonesia Tbk	UNVR
39	PT. Voksel Electric Tbk	VOKS
40	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2020

Lampiran 2. Tabulasi Data Sampel Penelitian

NO	KODE	TAHUN	FS	KM	KI	DK	RDk	JRDk
1	AKPI	2017	-1,117	0,046	0,700	5	1,667	4
		2018	-1,022	0,046	0,700	6	2,333	5
		2019	-1,077	0,046	0,700	6	2,333	4
2	APLI	2017	-0,771	0,267	0,588	7	2,667	12
		2018	-1,386	0,277	0,588	7	2,333	11
		2019	-0,664	0,285	0,588	7	2,667	12
3	ASII	2017	-0,579	0,000	0,501	12	4,000	7
		2018	0,283	0,000	0,501	11	4,333	7
		2019	-0,369	0,001	0,501	10	4,000	6
4	AUTO	2017	-0,344	0,150	0,800	8	3,000	6
		2018	0,047	0,150	0,800	8	3,333	6
		2019	0,112	0,150	0,800	8	3,333	6
5	BATA	2017	0,213	0,109	0,871	5	1,667	5
		2018	-0,162	0,109	0,871	5	1,667	6
		2019	-0,358	0,109	0,871	6	2,000	4
6	BRPT	2017	-0,966	0,712	0,019	3	1,000	6
		2018	-0,410	0,736	0,131	4	1,333	6
		2019	-1,687	0,718	0,049	4	1,333	6
7	CEKA	2017	-0,661	0,001	0,092	6	2,000	6
		2018	-0,732	0,001	0,092	6	2,000	6
		2019	-0,565	0,001	0,092	6	2,000	6
8	CPIN	2017	-0,226	0,000	0,555	5	1,667	6
		2018	-0,575	0,000	0,555	5	1,667	6
		2019	-0,635	0,000	0,555	5	1,667	6
9	DPNS	2017	-0,451	0,000	0,599	4	1,333	7
		2018	0,105	0,002	0,667	6	2,000	5
		2019	-0,175	0,002	0,667	5	1,667	4
10	EKAD	2017	-0,216	0,041	0,768	5	1,667	4
		2018	-0,143	0,041	0,775	4	1,333	5
		2019	-0,062	0,041	0,785	4	1,333	3
11	GGRM	2017	-0,484	0,007	0,755	4	4,667	8
		2018	-0,111	0,007	0,755	4	5,333	6
		2019	-0,361	0,007	0,755	4	5,000	7
12	HMSP	2017	-0,360	0,021	0,925	9	3,667	6
		2018	-0,625	0,021	0,925	9	4,000	6
		2019	-0,735	0,021	0,925	9	4,000	6

NO	KODE	TAHUN	FS	KM	KI	DK	RDk	JRDk
13	ICBP	2017	-0,487	0,065	0,805	7	3,000	8
		2018	-0,400	0,065	0,805	7	3,000	11
		2019	-0,230	0,065	0,805	7	3,000	10
14	INAF	2017	-2,310	0,252	1,678	8	4,333	13
		2018	-1,594	0,252	1,687	9	4,000	12
		2019	-1,240	0,252	1,687	9	4,667	12
15	INDF	2017	-0,870	0,000	1,003	11	4,000	10
		2018	-0,755	0,000	0,501	11	4,000	9
		2019	-0,622	0,000	0,501	11	3,667	10
16	INTP	2017	-0,272	0,269	0,510	5	1,667	7
		2018	-0,427	0,269	0,510	5	1,667	7
		2019	-0,184	0,269	0,510	4	1,333	8
17	KAEF	2017	-1,074	0,001	0,900	8	3,000	12
		2018	-0,737	0,001	0,900	8	3,000	13
		2019	-1,169	0,001	0,900	9	3,667	14
18	KBLM	2017	-1,085	0,089	0,816	5	2,000	10
		2018	-0,798	0,089	0,819	5	2,333	14
		2019	-0,216	0,089	0,818	6	2,333	12
19	KLBF	2017	-0,355	0,062	0,568	6	2,333	11
		2018	-0,339	0,062	0,570	6	2,000	10
		2019	-0,266	0,062	0,570	7	2,333	10
20	LION	2017	-1,901	0,002	0,577	7	2,333	10
		2018	-0,576	0,003	0,577	8	2,667	10
		2019	-0,653	0,003	0,577	8	2,667	9
21	LMSH	2017	0,033	0,206	0,322	6	2,000	6
		2018	-0,396	0,206	0,322	7	2,333	6
		2019	-0,839	0,206	0,322	6	2,000	6
22	MERK	2017	-0,142	0,028	0,867	5	1,667	6
		2018	-2,288	0,028	0,867	5	1,667	6
		2019	-0,573	0,028	0,867	5	1,667	6
23	MYOR	2017	-0,474	0,252	0,591	9	3,000	6
		2018	-0,619	0,252	0,591	9	3,667	6
		2019	-0,839	0,252	0,591	9	3,667	6
24	PICO	2017	-1,461	0,001	0,940	6	2,000	6
		2018	-1,153	0,001	0,940	6	2,000	6
		2019	-0,962	0,000	0,764	6	2,333	6
25	ROTI	2017	-0,933	0,112	0,703	7	3,000	6
		2018	-0,746	0,112	0,731	7	2,667	6
		2019	-0,612	0,112	0,731	7	2,667	6

NO	KODE	TAHUN	FS	KM	KI	DK	RDK	JRDK
26	SIDO	2017	0,178	0,053	0,810	9	3,000	13
		2018	0,108	0,053	0,810	9	3,000	12
		2019	-0,219	0,053	0,810	9	3,667	12
27	SKLT	2017	-0,770	0,007	0,841	5	2,333	6
		2018	-1,058	0,008	0,841	5	2,333	7
		2019	-0,829	0,008	0,841	5	2,000	6
28	SMCB	2017	-1,462	0,016	0,806	5	2,000	6
		2018	-1,491	0,016	0,806	6	2,333	7
		2019	-1,716	0,016	0,806	6	2,333	5
29	SMGR	2017	-0,830	0,021	0,510	6	2,667	12
		2018	-0,652	0,021	0,510	6	2,333	12
		2019	-0,426	0,021	0,510	6	2,333	12
30	SMSM	2017	-0,520	0,080	0,581	4	2,000	13
		2018	-0,359	0,080	0,581	4	1,667	12
		2019	-0,472	0,080	0,581	4	1,667	11
31	STTP	2017	-0,474	0,032	0,568	5	2,333	11
		2018	-0,791	0,033	0,568	5	2,333	12
		2019	-0,227	0,033	0,568	5	2,333	12
32	TCID	2017	-0,469	0,001	0,738	4	1,667	12
		2018	-0,316	0,001	0,738	4	1,667	12
		2019	-0,389	0,001	0,759	6	2,333	10
33	TKIM	2017	-1,088	0,212	0,597	4	1,667	6
		2018	-0,384	0,212	0,597	5	2,333	6
		2019	-0,372	0,212	0,597	5	2,000	6
34	TPIA	2017	-1,265	0,148	0,768	5	2,667	8
		2018	-0,570	0,149	0,768	5	2,667	6
		2019	-1,275	0,150	0,772	5	2,333	6
35	TRST	2017	-0,616	0,063	0,578	5	1,667	6
		2018	-0,693	0,063	0,578	4	1,667	6
		2019	-0,974	0,063	0,578	4	2,000	6
36	TSPC	2017	-1,866	0,000	0,852	4	1,333	4
		2018	0,313	0,000	0,852	4	1,667	3
		2019	-0,529	0,000	0,804	5	2,333	4
37	ULTJ	2017	0,223	0,338	0,369	6	2,333	4
		2018	-0,160	0,343	0,363	8	3,000	3
		2019	0,192	0,360	0,364	9	3,667	3
38	UNVR	2017	-2,362	0,030	0,850	11	4,333	7
		2018	-1,986	0,030	0,850	11	4,667	7
		2019	-1,991	0,030	0,850	11	4,667	6

NO	KODE	TAHUN	FS	KM	KI	DK	RDK	JRDK
39	VOKS	2017	-1,318	0,005	0,638	3	1,333	10
		2018	-1,181	0,005	0,640	3	1,333	9
		2019	-1,021	0,005	0,540	4	1,667	7
40	WIIM	2017	-0,307	0,619	0,051	6	2,667	8
		2018	-0,491	0,619	0,055	6	2,333	10
		2019	-0,484	0,619	0,051	6	2,667	10

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FS	120	-2.362	.313	-.67685	.562391
KM	120	.000	.736	.10877	.160446
KI	120	.019	1.687	.66758	.275753
DK	120	3	12	6.30	2.085
RDK	120	1.000	5.333	2.53890	.948927
JRDK	120	3	14	7.75	2.870
Valid N (listwise)	120				

Lampiran 4. Hasil Uji *One Sample T Test***One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
FS_2017	40	-.45598	.430696	.099722
FS_2018	40	-.33175	.268606	.089905
FS_2019	40	-.34283	.284029	.076532

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
FS_2017	-2.966	39	.086	-.455975	-.75768	-.35427
FS_2018	-2.566	39	.078	-.331750	-.61360	-.24990
FS_2019	-1.915	39	.082	-.342825	-.59763	-.28802

Lampiran 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.905	.262	3.458	.001		
KI	.019	.048	.385	.701	.841	1.189
KM	-.123	.059	-2.073	.040	.793	1.260
DK	-.698	.334	-2.092	.038	.907	1.103
RDK	-1.606	.902	-1.781	.082	.889	1.124
JRDK	.013	.108	.123	.902	.721	1.386

a. Dependent Variable: FS

Uji F (*goodness of fit*)ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138.321	4	34.580	17.232	.000 ^b
	Residual	190.639	95	2.007		
	Total	328.960	99			

a. Dependent Variable: FS

b. Predictors: (Constant), JRDK, KI, DK, RDK, KM

Koefisien determinasi (R^2)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.103 ^a	.011	-.033	.388	1.709

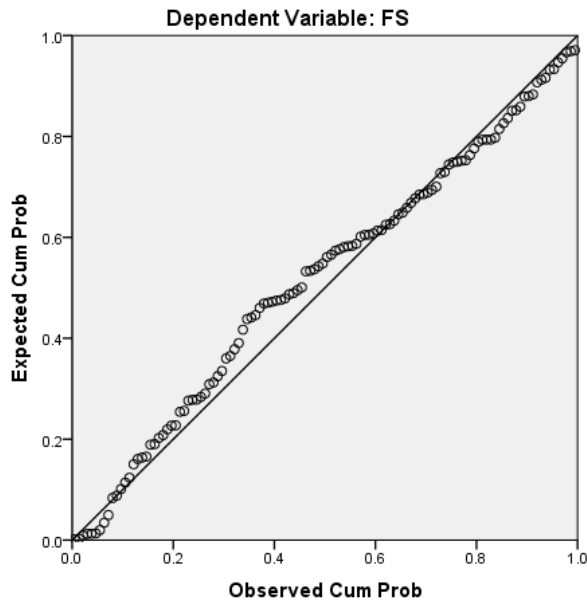
a. Predictors: (Constant), JRDK, KI, DK, RDK, KM

b. Dependent Variable: FS

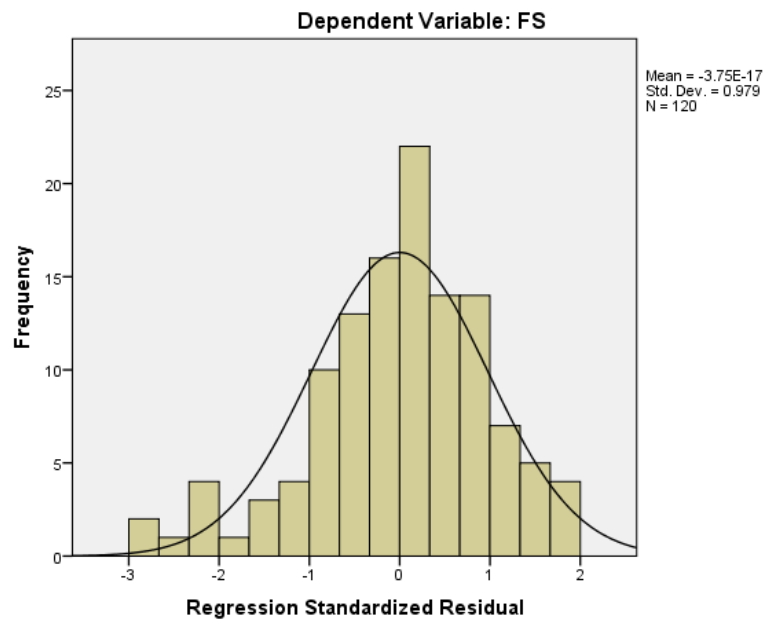
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas (Tidak Terdistribusi Normal)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

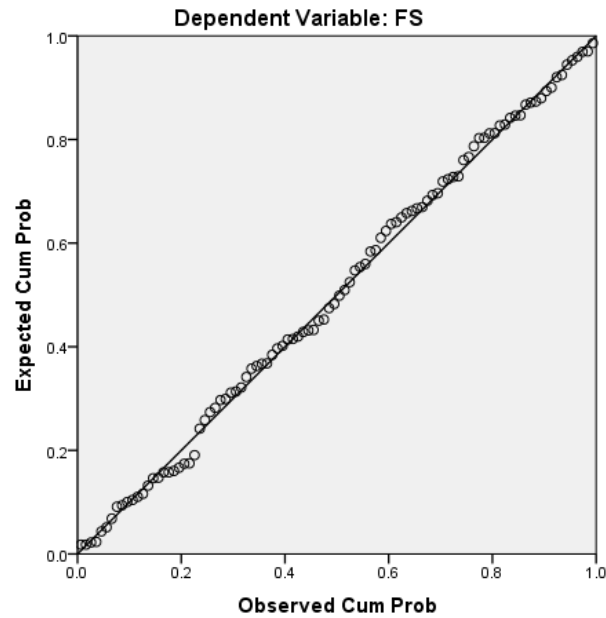


Histogram

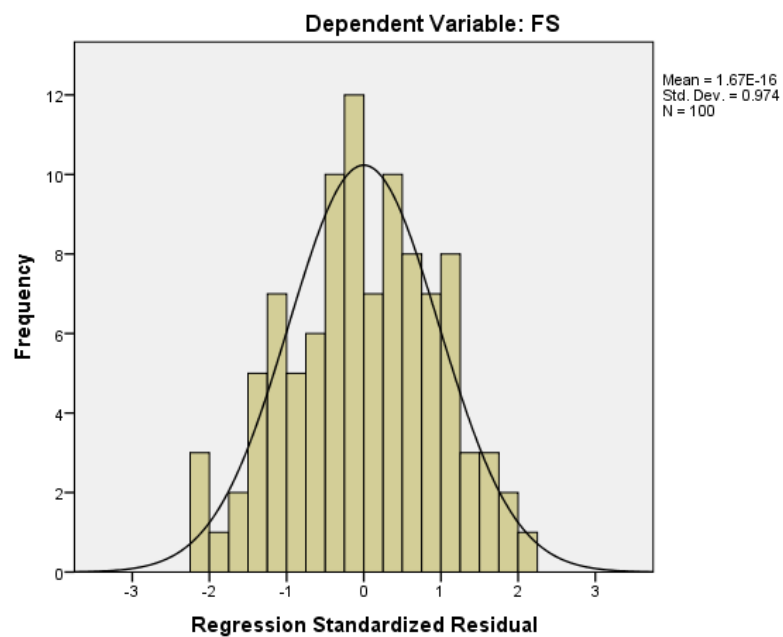


Uji Normalitas (Terdistribusi Normal)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



Uji Heteroskedastisitas

